BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pemanasan global dan perubahan iklim merupakan isu yang banyak menyita perhatian masyarakat internasional belakangan ini. Tidak hanya membawa dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup manusia, pemanasan global juga semakin berkembang dan tidak dapat dihentikan seiring semakin pesatnya kemajuan industri.

Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diakibatkan naiknya konsentrasi gas karbondioksida (CO₂) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Menurut laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), pada tahun 2010-2019 rata-rata emisi Gas Rumah Kaca berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah manusia.¹ Dampak dari meningkatnya CO₂ di atmosfer adalah peningkatan suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, anomali iklim, dan memicu timbulnya berbagai penyakit pada sistem pernapasan manusia.²

Antara tahun 2000 dan 2009, emisi GRK tahunan dari lahan yang terdegradasi³ menyumbang hingga 4,4 miliar ton emisi karbon dioksida

¹ IPCC. The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030. <https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/> (diakses pada 09 April 2022).

² Riza Pratama. Efek Rumah Kaca Terhadap Bumi. *Buletin Utama Teknik* Vol. 14, No. 2. Universitas Islam Sumatera Utara. Januari 2019. hal. 3.

³ Degradasi adalah perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan manusia.

(CO₂). Sebagai perbandingan, emisi CO₂ terkait energi global dianggap mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 36,3 miliar ton.⁴

Perbandingan suhu udara pada periode tahun tertentu yang relatif terhadap suhu rata-rata di periode normal disebut sebagai anomali suhu tahunan. Di Indonesia sendiri secara keseluruhan berdasarkan data dari BMKG, tahun 2016 menjadi tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.8 °C pada periode pengamatan dari tahun 1981 hingga 2020. Berdasarkan informasi mengenai suhu rata-rata global dari *World Meteorological Organization* (WMO) pada laporan terakhirnya pada awal Desember 2020 didapati bahwa tahun 2016 dikategorikan sebagai tahun terpanas (peringkat pertama) secara global. Kemudian tahun 2021 menjadikan Indonesia menempati urutan ke-8 negara terpanas dengan nilai anomali 0.4°C, sedangkan tahun 2020 dan 2019 ada pada peringkat kedua dan ketiga dengan nilai anomali 0.7 °C dan 0.6 °C.⁵

Pemanasan global sebagai pemicu kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang memiliki dampak cukup luas terhadap masyarakat. Tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan suhu bumi, pemanasan global juga mempengaruhi perubahan sistem iklim yang secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi berbagai

⁴ United Nations Climate Actions. Land – the Planet’s Carbon Sinks https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/land?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fufmfHGP_1EfnjTq19G3cRlkuEgielAuoWbrUU1AwFbEwLUMgJuCrhoC2yUQAvD_BwE (diakses pada 30 September 2022)

⁵ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ekstrem Perubahan Iklim. <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim> (diakses pada 20 Mei 2022).

aspek kehidupan manusia, seperti air, ekosistem wilayah pesisir, habitat makhluk hidup, lahan pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya.⁶

Secara global, isu terkait lingkungan bukanlah hal yang baru, meskipun Negara-negara di dunia baru mulai fokus pada permasalahan ini sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.⁷ Sebagai upaya lanjutan dari Konferensi Stockholm, 20 tahun setelahnya diadakanlah pertemuan di Rio de Janeiro, Brazil, yang mengangkat topik terkait permasalahan pencemaran, perubahan iklim, penipisan ozon, penggundulan hutan, dan sebagainya.⁸ Pada pertemuan tersebutlah isu perubahan iklim pertama kali dibahas secara serius.

Konferensi yang diadakan pada tahun 1992 tersebut menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro yang berisi empat kesepakatan internasional, yaitu prinsip-prinsip pembangunan kehutanan berkelanjutan (*forestry principles*), Agenda 21, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biological Diversity*).⁹

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan kesepakatan dalam Konferensi Rio de Janeiro berupa Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk membahas emisi

⁶ Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dampak dan Fenomena Perubahan Iklim. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/dampak-fenomena-perubahan-iklim> (diakses pada 05 Februari 2022).

⁷ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014. hal.5.

⁸ *Ibid.* hal.19.

⁹ *Ibid.* hal.20.

gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Konvensi ini menekankan tanggung jawab Negara maju dalam menghadapi segala kemungkinan terkait adanya perubahan iklim dan mengenai bantuan untuk Negara-negara berkembang yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam kesepakatan ini, Negara-negara maju diminta untuk menerapkan sistem pembatasan terhadap emisi GRK dan ikut serta membantu mengembangkan penyerapan GRK. Sebagai refleksi dari keinginan masyarakat dunia dalam mengurangi emisi GRK, dibentuklah suatu protokol mengenai perubahan iklim, yang selanjutnya disebut Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) pada saat Konferensi Negara Pihak (*the Conference of Parties*) yang ketiga (COP3) pada tahun 1977 di Kyoto, Jepang. Atas dasar inilah Protokol Kyoto menjadi sebuah instrumen hukum (*Legal Instrument*) untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim.¹⁰

Berlandaskan pada prinsip *common but differentiated responsibilities*, Protokol Kyoto mewajibkan Negara maju dan Negara dengan ekonomi di bawah transisi untuk mengurangi atau membatasi emisi GRK mereka sampai jumlah atau batas tertentu. Sebaliknya, protokol ini tidak memebankan kewajiban apapun terhadap Negara berkembang.¹¹

Sebagaimana tertuang dalam Protokol Kyoto, negara-negara pencemar bersepakat untuk mencapai target pengurangan emisi hingga jangka waktu tertentu. Negara-negara penghasil polusi tersebut diberikan jatah “kredit emisi” yang setara dengan tingkat pengeluaran emisi mereka

¹⁰ *Ibid.* hal.24-25.

¹¹ Sukanda Husin. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2016. hal.86.

sekitar tahun 1990 yang dikurangi dengan komitmen target pengurangan emisi untuk kedepannya. Kredit ini diukur dalam unit gas rumah kaca dimana satu ton CO₂ setara dengan satu kredit emisi. Kredit ini merupakan semacam lisensi untuk mengotori udara guna mencapai tingkat reduksi rata-rata 5.2 % seperti yang telah disepakati dalam Protokol Kyoto. Kuota kredit tersebut dapat dialokasikan oleh Negara-negara pencemar pada basis wilayah negaranya. Maka dari itu, semakin besar kredit yang dimiliki, maka semakin besar negara tersebut dapat melakukan pencemaran udara.¹²

Dalam *Article 3* Protokol Kyoto disebutkan bahwa semua Negara maju yang terdapat dalam Annex B Protokol Kyoto harus melakukan pengurangan secara berbeda-beda atas enam gas dalam satu paket (*a basket of six gases*) dalam kurun waktu antara 2008-2012. Selain mewajibkan pengurangan emisi secara individual, Protokol Kyoto juga membenarkan pengurangan emisi melalui 3 cara lain yaitu *carbon sinks*, *bubbling scheme*, dan *flexibility mechanism*.¹³

Di antara ketiga mekanisme tersebut, aspek paling unik sekaligus kontroversial adalah *flexibility mechanism*, yang memasukkan *market-based mechanism* atau mekanisme berbasis pasar (mekanisme pasar) dalam mencapai kepatuhan Negara-negara terhadap penurunan emisi, yaitu melalui perdagangan atau penukaran target pengurangan emisi (*emission reduction target*) antar anggota dengan biaya yang lebih terjangkau. Terdapat tiga cara yang digunakan dalam mekanisme pasar yaitu *emission*

¹² WALHI Bali. Perdagangan Karbon. <https://walhibali.org/perdagangan-karbon/> (diakses pada 21 Februari 2022)

¹³ Sukanda Husin. *Op.Cit.* hal. 86-87.

*trading, Joint Implementation (JI), dan Clean Development Mechanism (CDM).*¹⁴

Ketiga bentuk mekanisme berbasis pasar sebagai upaya penurunan emisi tersebut dikenal juga dengan istilah Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*). Perdagangan karbon atau dikenal juga dengan istilah *cap and trade* pertama didemonstrasikan antara 1967 dan 1970 dengan metode simulasi komputer ekonomi mikro. *National Air Pollution Control Administration* (sekarang *United States Environmental Protection Agency's Office Of Air and Radiation*) menerapkan suatu model matematika dalam menghitung sumber emisi di beberapa kota untuk membandingkan efektifitas antara perubahan industri ke teknologi rendah karbon atau mengatasi masalah emisi lewat jual beli di pasar karbon. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah reduksi dengan metode perdagangan karbon lebih efektif dan murah dan dibanding perubahan industri ke teknologi rendah karbon. Dari situlah awal mula munculnya konsep *cap and trade*.¹⁵

Sebagai wujud keseriusan dan komitmen negara-negara di dunia dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui perdagangan karbon ini, maka menjelang berakhirnya periode komitmen Protokol Kyoto, pada COP 21 di Paris akhir tahun 2015 dibentuklah suatu kesepakatan internasional dalam menekan dan mengawal upaya reduksi GRK secara

¹⁴ *Ibid.* hal.87.

¹⁵ Amanda Humaira. Peran Indonesia dalam Perdagangan Emisi Karbon (*Carbon Trading*) dilihat dari perspektif hukum internasional. *Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.* 2021. hal.5.

global yang dikenal dengan nama *Paris Agreement to the UNFCCC*. *Paris Agreement* mencakup komitmen dari semua negara untuk mengurangi emisi mereka dan bekerjasama untuk melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan menyerukan negara-negara untuk terus memperkuat komitmen tersebut dari waktu ke waktu. Perjanjian tersebut juga memungkinkan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. *Paris Agreement* memuat tujuan jangka panjang negara-negara untuk ; secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membatasi kenaikan suhu global di abad ini hingga 2 derajat Celcius dan secara bersamaan mengupayakan untuk membatasi peningkatan lebih jauh hingga 1,5 derajat ; meninjau dan memperkuat komitmen negara setiap lima tahun ; serta memberikan pembiayaan kepada negara-negara berkembang untuk memitigasi perubahan iklim dalam upaya memperkuat ketahanan dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak iklim.¹⁶

Namun berbeda halnya dengan *Kyoto Protocol 1998*, dalam *Paris Agreement* tidak disebutkan secara eksplisit istilah yang merujuk pada perdagangan karbon ataupun perdagangan emisi. *Paris Agreement* menggunakan beberapa istilah seperti *Voluntary Cooperative Approaches*, *Sustainable Development Mechanism*, dan *Non-market Approaches*.¹⁷

¹⁶ United Nations. The Paris Agreement. <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement> (diakses pada 09 April 2022).

¹⁷ Partnership for Market Readiness, Indonesia. Briefing Paper; Pasar Karbon dan Persetujuan Paris. Vol.2 <https://www.thepmr.org/system/files/documents/Briefing%20paper%20Carbon%20Market%20and%20the%20Paris%20Agreement%20-%20bahasa%20vesion.pdf> (diakses pada 03 Maret 2022).

Berdasarkan data dari Bank Dunia hingga bulan April 2021, harga karbon di negara berkembang mayoritas berada pada angka di bawah 10 USD/tCO₂e. Nilai tersebut sangat jauh dibandingkan dengan harga karbon di negara maju yang berada pada kisaran 18-137 USD/tCO₂e.¹⁸ Dari data tersebut ditemukan adanya ketidakseimbangan harga karbon antara Negara maju dan Negara berkembang yang berakibat pada persaingan pasar yang tidak sehat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa instrumen perdagangan karbon yang digunakan saat ini tidak berfokus pada reduksi emisi Gas Rumah Kaca, melainkan sebagai sarana tawar menawar negara-negara di dunia dalam mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk mengotori udara secara legal.

Selain itu, terdapat beberapa isu kritis terkait pengaturan perdagangan karbon dalam *Paris Agreement*, diantaranya adalah adanya mekanisme fleksibel dan sistem kerjasama sukarela melalui penetapan target pengurangan emisi yang diserahkan untuk ditetapkan secara nasional oleh masing-masing negara berdasarkan kemampuan nasionalnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul “**Pengaturan Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) Sebagai Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global Berdasarkan *Paris Agreement 2015***”.

¹⁸ Antony F. Budiman. Menyikapi Isu Kritis Perdagangan Karbon Global. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210909093905-14-274852/menyikapi-isu-kritis-perdagangan-karbon-global> (diakses pada 03 Maret 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah pengaturan perdagangan karbon (*carbon trading*) yang terdapat dalam *Paris Agreement* 2015 efektif dalam menekan laju perubahan iklim global?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas *Paris Agreement* 2015 sebagai instrumen hukum internasional perdagangan karbon.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum internasional, khususnya terkait Perdagangan Karbon. Penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan hukum internasional dan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan topik atau bidang yang sama.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi terkait perdagangan karbon dalam lingkup hukum internasional.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, atau perbuatan mengatur.¹⁹ Dalam ilmu hukum, pengaturan disebut juga kebijakan atau peraturan, yang umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk pengaturan dalam hukum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan memiliki daya paksa juga sanksi bagi yang melanggarnya.

Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai aturan tertulis yang memuat norma hukum yang secara umum bersifat mengikat serta merupakan ketetapan yang dibentuk sesuai prosedur peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.²⁰

Pengaturan dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait perdagangan karbon, khususnya yang terdapat dalam *Paris Agreement* 2015 sebagai instrumen internasional mengenai perdagangan karbon.,

¹⁹ <https://kbbi.web.id/atur> (di akses pada 10 Maret 2022)

²⁰ Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2018. hal.1-2.

dan instrumen hukum lain terkait pengaturan perdagangan karbon pada tingkat global.

2. Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*)

Perdagangan Karbon adalah kegiatan jual beli unit emisi karbon dengan tujuan untuk melakukan *offset* terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan usaha pihak pembelinya.²¹ Perdagangan karbon dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 diartikan sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Secara umum terdapat dua jenis perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi (*emission trading*) dan perdagangan kredit berbasis proyek (*trading in project based credit*). Tak jarang juga dua kategori tersebut disatukan menjadi sistem perdagangan hibrida.²²

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan iklim pada dasarnya merupakan peristiwa yang berlangsung secara alami dengan adanya variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim secara drastis, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas.²³ Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil tersebut kemudian menghasilkan

²¹ ICDX Group. Mengenal Perdagangan Karbon. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/mengenal-perdagangan-karbon> (diakses pada 13 Februari 2022).

²² WALHI Bali. *Loc.Cit.*

²³ United Nations. What is Climate Change? <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change> (diakses pada 13 Februari 2022).

gas Karbon Dioksida yang menjadi pemicu utama pemanasan global. Pengendalian perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan laju perubahan iklim secara drastis.

Adapun yang dimaksud dengan perubahan iklim dalam penelitian ini adalah peningkatan kadar Emisi GRK di atmosfer, yang mengakibatkan kenaikan suhu permukaan bumi dan memicu terjadinya pemanasan global.

4. *Paris Agreement* 2015

Agreement (persetujuan) dalam hukum internasional dipahami sebagai bentuk perjanjian yang mengatur hal-hal tertentu secara khusus. *Agreement* juga dapat bersifat teknis atau administrasi.²⁴

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement 2015) adalah tonggak penting dalam proses pengendalian perubahan iklim multilateral, karena untuk pertama kalinya perjanjian yang mengikat membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.²⁵

Paris Agreement adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini telah diadopsi oleh 196 Pihak pada COP 21 di Paris, pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuan perjanjian ini adalah

²⁴ Andreas Pramudianto. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*. Malang : Setara Press, 2014. hal.68.

²⁵ UNFCCC. The Paris Agreement. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> (diakses pada 21 April 2022).

untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri.²⁶

E. Landasan Teori

1. Teori Ekosentris

Ekosentris adalah suatu teori dalam etika lingkungan hidup yang memusatkan perhatian pada keseluruhan unsur ekologis, baik makhluk hidup maupun benda-benda yang ada di lingkungan. Teori ini menganggap bahwa secara ekologis, semua yang ada di lingkungan, baik biotik maupun abiotik memiliki keterikatan satu sama lain. Maka dari itu, tanggung jawab moral dan kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua realitas ekologis tanpa terkecuali.²⁷

Teori Ekosentris semakin diperkuat oleh teori etika lingkungan (*Deep Ecology*) yang tidak hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk hidup, namun berfokus pada kepentingan seluruh entitas yang ada di lingkungan, baik manusia maupun makhluk lain, dalam upaya mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup.²⁸

Teori Etika Lingkungan Hidup (*Deep Ecology*) adalah salah satu teori yang berasal dari teori ekosentris. Istilah *Deep Ecology* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1973, oleh salah satu tokoh teori

²⁶UNFCCC, *Loc. Cit.*

²⁷Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Teori-Teori Lingkungan Hidup. <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/> (diakses pada 20 November 2022).

²⁸ Abdurrahman Supardi Usman. Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legality, Volume 26 Nomor 1*. 2018. hal.9.

ekosentris asal Norwegia bernama Arne Naess. Konsep *Deep Ecology* merupakan suatu etika baru dalam hukum lingkungan yang tidak hanya memusatkan perhatian pada kehidupan manusia, namun pada seluruh makhluk dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan. Tanpa mengubah hubungan antara manusia dengan manusia, teori ini memusatkan perhatian pada seluruh spesies, singkatnya pada biosfer²⁹ secara keseluruhan. *Deep Ecology* juga tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, namun juga kepentingan jangka panjang. Maka dari itu, prinsip moral *Deep Ecology* berfokus pada kepentingan seluruh komunitas ekologis.³⁰

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan modern, teori ekosentris memandang bahwa lingkungan hidup tidak hanya terbatas dari apa yang dapat diperoleh atau dimanfaatkan oleh manusia. Lebih dari itu, hak-hak makhluk hidup lain dan lingkungan itu sendiri juga menjadi objek dari kajian teori ekosentris. Paham ekosentris menolak sifat egoistis dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan. Maka dari itu, kepentingan seluruh aspek dalam lingkungan hidup harus

²⁹ Biosfer merupakan bagian luar permukaan bumi yang mencakup udara, air, dan daratan dimana kehidupan dan proses biotik berlangsung. (sumber: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kemendikbud-dukung-sidang-biosfer-internasional-unesco-di-palembang>)

³⁰ M.Yasir Said dan Yati Nurhayati. Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Jurnal Al 'Adl, Volume12 Nomor 1.2020*. hal.47-48.

menjadi bahan pertimbangan moral dalam pembentukan suatu hukum, kebijakan, tindakan maupun keputusan.³¹

Berdasarkan tujuan dari teori Ekosentris, khususnya etika *Deep Ecology*, maka manusia sebagai makhluk hidup dengan akal dan kearifan budi pekertinya memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir semua kepentingan makhluk hidup dalam upaya pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya, semua kebijakan mengenai lingkungan hidup harus mencakup kepentingan seluruh makhluk hidup, baik saat ini maupun generasi yang akan datang.

2. Teori Hukum Alam

Teori Hukum Alam diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yang membagi hukum menjadi hukum yang bersifat khusus (hukum positif) dan hukum yang bersifat universal. Hukum yang bersifat khusus diartikan sebagai hukum yang dijalankan oleh suatu negara, sedangkan yang bersifat universal disebut juga dengan hukum alam, dimana umat manusia mengakui prinsip-prinsip tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya dari teori hukum alam dipelopori oleh pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius.³²

Ajaran hukum alam ini pada mulanya memiliki keterkaitan yang kuat dengan ajaran agama dan ketuhanan. Ciri khas keagamaan yang

³¹ Peni Verawati dan Johannes Hattazohahau Dachi. Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls dengan Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 6 Nomor 1*. 2021.hal.60.

³² Khoirur Rizal Lutfi. Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1*. 2014. hal.96.

kuat dalam teori ini pertama kali dilepaskan hubungannya dengan agama oleh Hugo Grotius. Grotius mengartikan hukum alam sebagai hukum ideal dengan dasar pemikiran yang dilandaskan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal , atau dengan kata lain merupakan kesatuan kaidah yang terdapat dalam akal manusia. Dalam hubungannya dengan hukum internasional, penganut teori hukum alam percaya bahwa kekuatan mengikat hukum internasional tidak lain dikarenakan oleh hukum alam yang memang sudah ditetapkan dalam kehidupan berbangsa masyarakat internasional. Dengan demikian, keterikatan negara-negara terhadap hukum internasional dalam hubungan antar negara satu sama lainnya adalah karena ada hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam sebagai hukum tertinggi.³³

Kepatuhan negara terhadap hukum internasional menurut hukum alam adalah suatu keharusan. Hal tersebut didasarkan pada nilai-nilai universal tidak tertulis yang secara umum terbagi menjadi tiga pokok. Pertama, mengenai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua, mengenai larangan terhadap perampasan hak dalam bentuk apapun. Dan ketiga, mengenai pengakuan terhadap hukum dan kebiasaan internasional tidak tertulis. Dalam pandangan lainnya disebutkan bahwa kewajiban negara untuk patuh terhadap hukum internasional dilandaskan pada beberapa aspek yaitu ekonomi,

³³ Dina Sunyowati, Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.1. 2013. hal.71.

politik, jiwa (manusia), dan berbagai aspek lainnya yang wajib dilindungi bersama oleh masyarakat internasional.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensintemasikan, menginterpretasikan, menilai, dan menganalisis hukum positif.³⁵ Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan pada dasarnya dilakukan dengan melalui telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu) yang dibahas. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih memiliki

³⁴ Khoirur Rizal Lutfi. *Op.Cit.* hal.103-104.

³⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008. hal.80.

³⁶ Irwansyah. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. 2020. hal.42.

kekurangan atau malah membentuk praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis maupun pelaksanaannya.³⁷

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan melalui telaah terhadap latar belakang dan perkembangan isu hukum secara historis. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang melatarbelakangi dan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan.

Metode penafsiran dalam pendekatan sejarah terbagi menjadi metode penafsiran sejarah perumusan peraturan perundang-undangan dan metode penafsiran sejarah hukum. Metode penafsiran sejarah perumusan undang-undang berfokus pada latar belakang perumusan, yang mengkaji perdebatan yang terjadi ketika naskah akan dirumuskan. Sedangkan metode penafsiran sejarah hukum berfokus pada makna yang terkait dengan kehidupan masyarakat masa lampau, yang merujuk pada pendapat para ahli di masa lampau, dan norma-norma hukum masa lampau yang masih relevan hingga saat ini.³⁸

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberi sudut pandang terkait analisis dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari segi aspek atau konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari sudut pandang nilai yang

³⁷ *Ibid.* hlm.133-134.

³⁸ *Ibid.* hlm.141-143.

terkandung dalam penormaam peraturan yang terkait dengan konsep-konsep yang digunakan tersebut. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan untuk memastikan apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.³⁹

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yang menjadi sumber hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992.
- 2) *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* 1998.
- 3) *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* 2016.
- 4) *Vienna Convention on the law of treaties* 1969.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat atau doktrin ilmu hukum yang telah diakui dan diterima secara luas di kalangan ahli ilmu hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai penunjang bahan hukum primer yang valid untuk penelitian ini.

³⁹ *Ibid.* hlm.151-152.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan lain yang dapat menunjang atau mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, website, dan bahan sejenis lainnya.

4. Analisis bahan hukum

Dari hasil pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut, dibuatlah suatu analisis dalam bentuk deskripsi atau uraian terkait topik permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mensistematisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas atau diteliti, kemudian menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan atau konvensi internasional terkait permasalahan yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terkait perdagangan karbon (*carbon trading*) dari perspektif

hukum internasional dan perkembangan instrumen hukum internasional terkait perdagangan karbon, mulai dari konvensi perubahan iklim pertama, hingga kebijakan terbaru mengenai perdagangan karbon. Penulis akan memberikan gambaran mengenai konsep tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan internasional, dan mengenai kekuatan mengikat *Paris Agreement 2015* sebagai instrumen internasional yang mengatur mengenai perdagangan karbon.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan membahas bagaimana pengaturan terkait perdagangan karbon, mekanisme perdagangan karbon dan kesepakatan aturan mengenai *carbon pricing* dalam *Paris Agreement 2015* sebagai uraian jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan merumuskan kesimpulan dari permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan disertai dengan saran dari penulis terkait topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.